

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGGUNAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
DANA DESA UNTUK MEMBANTU KEPEMILIKAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
DI DESA BONIAN, KECAMATAN SILIMA PUNGA-PUNGA, KABUPATEN DAIRI,  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Butar F. Sidabutar  
NPP. 29.0095

*Asdaf Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara  
Program Studi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil*

Email: 29.0095@praja.ipdn.ac.id

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** The research was conducted to identify how members of the village government work as a pattern of development in the management of Village Fund Cash Assistance for recipients to complete population administration for family members in Bonian Village. Completeness of population administration from areas far from the service center by encouraging the wheels of the government to be extra fast and responsive. Completeness of population administration from areas far from the service center by encouraging the wheels of the government to be extra fast and responsive. **Purpose:** This study aims to know s to complete population administration for family members in Bonian Village. **Method:** This study uses Using a qualitative method by describing the results of the study conducted an inductive approach to the research focus. Techniques used in data collection are interviews, documentation, and observation. **Result:** The findings are youth conducted gave the results that the role of village government officials had obstacles and with a 4-dimensional pattern, the obstacles were based on their respective role categories. **Conclusion:** research conducted gave the results that the role of village government officials had obstacles and with a 4-dimensional pattern, the obstacles were based on their respective role categories. People who are less responsive to family population administration are encouraged by the motivation of the village government, people with disabilities are immediately given service facilities at their respective homes, for people who want to take care of population documents, they are given facilitation from the village government, and the community is given regulations to understand how the administration is correct legally.

**Keywords:** role; service; population administration; beneficiary

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi bagaimana para anggota pemerintahan didesa bekerja sebagai pola pengembangan dalam pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi penerima untuk melengkapi administrasi kependudukan bagi

anggota keluarga di Desa Bonian. Kelengkapan administrasi kependudukan dari daerah yang jauh dari pusat pelayanan dengan mendorong para penggerak roda pemerintahan desa ekstra cepat dan tanggap. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana para anggota pemerintahan desa bekerja sebagai pola pengembangan dalam pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi penerima untuk melengkapi administrasi kependudukan bagi anggota keluarga di Desa Bonian. **Metode:** Menggunakan metode kualitatif dengan mendiskripsikan hasil penelitian melakukan pendekatan induktif kepada fokus penelitian. Teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data dengan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi. **Hasil/Temuan:** Penelitian yang dilakukan memberikan hasil peran para aparat pemerintahan desa memiliki hambatan dan dengan pola 4 dimensi maka hambatan berdasarkan kategori peran masing-masing. **Kesimpulan:** Masyarakat yang kurang responsiv terhadap administrasi kependudukan keluarga didorong dengan motivasi dari para pemerintah desa, para penyandang disabilitas langsung diberikan fasilitas pelayanan kerumah masing-masing, bagi masyarakat yang hendak mengurus dokumen kependudukan diberikan fasilitas dari pemerintah desa, serta masyarakat diberikan regulasi agar paham bagaimana administrasi benar secara hukum.

**Kata kunci:** peran; pelayanan; administrasi kependudukan; penerima bantuan

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sebagai daerah administrasi paling dasar desa merupakan unit terkecil dalam sebuah pembangunan memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan kualitas masyarakat dalam cakupan yang lebih luas. Indonesia sebagai negara demokrasi memerintahkan pembangunan yang merata agar mencapai tujuan pembangunan sebagaimana yang telah disepakati sebagai negara demokrasi bahwa semua rakyat harus mendapatkan kesejahteraan tanpa adanya perbedaan kondisi secara sosial dan alami. Rencana kebijakan langsung pemerintah pusat kepada desa langsung adalah sebuah kebijakan pemerataan dalam pembangunan. Kondisi iklim desa hanya mampu dikelola desa secara keseluruhan secara fisik namun dalam pergerakan penduduk, desa tidak mampu mengelola langsung harus mengikut sertakan pusat dalam pelaksanaanya.

Pemerintah desa sebagai pengelola dalam menjalankan pemerintahan desa yang terdiri dari para pembantu desa tidak selalu mampu menghadapi masalah dalam pembangunan desa dikarenakan jabatan langsung yang berbentur dengan penduduk yang memiliki sikap dan tindakan yang selalu mampu menghadapi aturan dan kondisi terkini. Pemerintah desa diberikan kewenangan yang bersifat desentralisasi dalam kebijakan langsung agar desa lebih berkembang dan memanfaatkan kondisi desa dengan pengembangan melalui bantuan pemerintah yang diberikan langsung kepada desa melalui APBD yang masuk dalam APBN. Mendorong kinerja ekstra bukan hal mudah karena desa merupakan ujung tanduk pemerintahan Indonesia walaupun kebijakan harus mengikuti alur pemerintah pusat. Pemerintah desa diberi dana besar melalui dana langsung dari pusat berupa dana desa..

Dana yang besar digelontorkan pemerintah pusat melalui peraturan agar terjadinya pengaturan yang jelas atas segala pengeluaran negara baik bagi pembangunan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Dalam undang-undang yang dibentuk pada Tahun 2014 pada Pasal 72 Ayat 2 tertuang pada poin nomor 6, desa memiliki sumber pendapatan lain melalui pengalokasian dana desa yang wajib dikeluarkan pemerintah pusat kepada desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Kontribusi besar dilimpahkan kepada desa dalam pengelolaan dana besar yang diberi pemerintah.

Pengalihan dana dilakukan desa dari dana desa kepada masyarakat sebagai bantuan. Subsidi selalu diberikan, dalam keadaan seperti ini pemerintah desa berupaya membangun kerja sama kepada pusat

sebagai pertanggung jawaban kinerja pembangunan. Langkah yang diambil desa menggunakan dana desa sebagai bantuan langsung yang diberikan kepada masyarakat sekitar. Sasaran utama yang diambil adalah penduduk setempat secara administrasi. Desa yang mengalokasikan dana bantuan harus memiliki pertanggung jawaban moral dan materil kepada negara sebagai pelayan ditingkat terendah, maka bantuan dari pemerintah desa sangat diperlukan bagi pemerataan pencapaian tujuan pembangunan dalam mencegah ketimpangan penduduk. Keadaan masyarakat dengan ketentuan tertentu yang mendasarkan masyarakat untuk mendapatkan dan berhak secara kriteria memperoleh bantuan dana alokasi ini.

Administrasi penduduk sangat dipengaruhi perubahan dinamis maupun perpindahan melihat situasi ekonomi setempat. Tidak serta merta masyarakat yang tergolong mampu agar berpindah adakalanya masyarakat ingin mendapatkan kepastian hidup melalui perubahan baik melakukan perubahan pindah pencaharian maupun melalui pindah sumber daya pencarian. Fenomenanya administrasi sebagai pengakuan hukum bahwa perubahan dalam sosial selalu berperan penting. Masyarakat kadang mengenyampingkan pentingnya administrasi sebagai pengakuan hukum karena hal tertentu baik biaya, kondisi sekitar, maupun kondisi fisik. Perlu pendalaman melihat masalah ini agar pengambilan keputusan pemerintah desa terlihat adil dan mampu menyelaraskan aturan dengan keadaan penduduk. Kebijakan tidak selalu sesuai keadaan maka tinjauan perlu dilakukan langsung kedalam masyarakat desa.

### **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Penerima bantuan langsung tunai pada kondisinya merupakan masyarakat yang mengalami pendapatan dibawah rata-rata penghasilan sebagai pendapatan perkapita di Indonesia. Masyarakat yang desa asli yang sebagian besar pendapatannya hasil pertanian tidak menerima karena merasa perumusan dan musyawarah atas data penerima bantuan itu memiliki kurang keakuratan sehingga masyarakat merasa adanya ketidak sesuaian antara kebijakan dan pelaksanaannya.

Secara data bahwa penduduk hanya sebagian kecil yang memperoleh bantuan, berdasarkan data ini maka perlu dilakukan pengkajian bagaimana pemerintah desa melakukan alur pemberian bantuan ini kepada penduduk setempat. Dari data yang diterima sebagai landasan dalam meneliti sejauh mana peran desa dalam melengkapi administrasi kependudukan masyarakat desa.

Keadaan yang tidak memungkinkan pergerakan masyarakat dalam bekerja tanpa mengesampingkan kondisi covid-19 menunjang pemerintah ekstra hati-hati dalam mengambil keputusan agar tepat sasaran dalam bantuan alokasi dana desa. Bantuan langsung tunai dana desa merupakan proses pengalihan fungsi sementara melihat kondisi ekonomi masyarakat dan pendapatan yang menurun. Pemerintah hadir melalui kebijakan dengan penghematan kemudian pengalihan dana desa. Penduduk sebagai objek utama harus merata merasakan kebijakan sebagai bukti pemerintah hadir dalam menjaga keadaan pada masa-masa sulit seperti sekarang ini. Sebagai dasar pemerintah dalam pemerataan bantuan desa mengatur sendiri kebijakan namun berpegang dengan kesejahteraan seluruh penduduk.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pemberdayaan pemuda maupun konteks kegiatan membudayakan literasi masyarakat. Penelitian dilakukan Pananrangi (A.Pananrangi M 2019) dengan judul Kinerja Pemerintahan Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Didesa Siawung Kecamatan Barru Kabupaten Barru dengan menggunakan metode Triangulasi Sumber Data Dan Metode dengan memberikan hasil bahwa desa

berperan penting sebagai penghubung dinas kependudukan dan pencatatan sipil dengan masyarakat sebagai pemberkasan dan memberi alur serta rekomendasi kependudukan kepada dinas kependudukan. Penelitian dilakukan oleh Suhindarno (Heny Suhindarno 2018) dengan judul Upaya Sekretaris Desa Dalam Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan (Suatu Studi Di Desa Napis Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro). Menggunakan teknik analisis data interaktif Model miles and Huberman. Memberikan hasil bahwa para pemerintah desa 1. Desa membantu dalam pembuatan surat kelahiran dan kematian 2. Desa membantu dalam pembuatan surat migrasi penduduk. Penelitian Yolanda dkk. (Yolanda Madea, Alden Laloma, dan Very Y. Londa 2017) dengan menitik beratkan pada Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud. Metode yang digunakan yaitu metode Miles Dan Huberman Yaitu Analisis Dan Interaktif. Memberikan hasil bahwa Kepala desa turun langsung dalam pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pengelolaan, dan melakukan perubahan pada bidang-bidang penggunaan agar tepat sasaran. Penelitian berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Nafida Arumdani dkk. (Nafida Arumdani, Salsabella Nanda Rahmania, Zumrotun Nafi'ah, Dan Tukiman 2021) dengan mengangkat judul Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) di Desa mojoruntut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo. Teknik Analisis yang digunakan Data Deskriptif Kualitatif (Non Statistik). Hasil dari penelitian bahwa Program BLT DD yang dilakukan kurang efektif dalam hal sasaran penerimaan dikarenakan tarik ulurnya pemerintah. Penelitian Cecelia Sasuwuk dkk. (Cecelia Helenia Sasuwuk, Florence Daicy Lengkong, Dan Novie Anders Palar 2021) dengan mengangkat tema Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Didesa Sea Kabupaten Minahasa. Metode dalam penelitian menggunakan metode Deskriptif Kualitatif dengan hasil bahwa dana desa telah tepat penggunaan sebagai BLT kurang efektif dikarenakan data penduduk penerima bertimpang tindih.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni peran pemerintah desa dalam penggunaan bantuan langsung tunai dana desa untuk membantu kepemilikan administrasi kependudukan di Desa Bonian, Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, metodenya yang digunakan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif juga berbeda dengan penelitian Pananrangi, Heny Suhindarno, Yolanda dkk, Nafida, maupun Cecelia Helenia dkk. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Arif (Arif, 2012) yang menyatakan bahwa peran pemerintah dedaerah diukur menggunakan 4 indikator yaitu, fasilitator, mobilisator, regulator, dan motivator.

#### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai peran para pemerintah desa dengan meneliti hambatan yang muncul dengan pola pengatasan yang dilakukan pemerintahan didesa dalam penggunaan bantuan langsung tunai dalam membantu kepemilikan administrasi kependudukan masyarakat didesa Bonian, Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara.

## **II. METODE (5-10%)**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui pendekatan langsung dari dalam pelayanan dan kebijakan yang dilakukan terhadap tindakan tertentu penelitian dijelaskan oleh

Simangunsong (2016:190) penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan desain atau bentuk beragam.

Teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti dalam mencari dan menetapkan langkah penelitian demi mendapatkan data utama yang sempurna. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian pemerintahan dan penelitian lainnya menurut Simangunsong (2017:185) ada dua jenis yaitu "*field research approach*" dengan pengumpulan data penelitian yang sepenuhnya dilakukan di lapangan, sedangkan "*library research approach*" adalah teknik pengumpulan data yang sepenuhnya dilakukan di dalam perpustakaan. Metode yang akan digunakan adalah pengumpulan data "*field research approach*" menggunakan wawancara dengan Kepala desa, Sekretaris desa, Kepala urusan bagian umum, Kaur pelayanan, Kepala dusun 4 orang, Masyarakat 5 orang, observasi dan dokumentasi. Aktivitas analisis data penulis melakukan analisis dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dianalisis dengan nalar peneliti dan dihubungkan dengan fakta dan teori yang ada. Berkaitan dengan hal tersebut Simangunsong (2017:225) berpendapat bahwa dalam penelitian kualitatif pemerintah analisis data dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah kembali dari lapangan. penelitian ini penulis juga menggunakan teknik triangulasi analisis data. Menurut Simangunsong (2016:224) triangulasi data dapat dikatakan sebagai triangulasi sumber. Berusaha menggunakan berbagai sumber yang ada. Teknik triangulasi model ini dikenal dengan istilah check, recheck, dan cross check dimana data awal yang akan dilakukan penelitian harus disajikan berupa landasan awal untuk melakukan pendalaman dalam melakukan penelitian atau proses recheck dan dari kedua model di atas maka dalam penelitian kualitatif harus dilakukan cross check.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN (60-70%)**

Penulis menganalisis peran pemerintah desa dalam penggunaan bantuan langsung tunai dana desa untuk membantu kepemilikan administrasi kependudukan didesa Bonian dengan menggunakan 4 dimensi peran pemerintah di daerah menurut Arif yaitu fasilitator, mobilisator, regulator, dan motivator. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

#### **3.1. Peran Pemerintah Desa**

Indikator peran pemerintah di daerah sebagaimana dikemukakan menurut arif (2012: 69) ada 4, yaitu pemerintah desa sebagai fasilitator, mobilisator, regulator, dan motivator. Dasar indikator peran ini dapat dilakukan dalam melihat bagaimana peran pemerintah desa mampu membantu memenuhi administrasi kependudukan bagi masyarakat penerima bantuan langsung tunai dana desa.

##### **3.1.1. Fasilitator (Pemberi Fasilitas)**

Menghubungkan desa dan kecamatan desa sebagai pengantar dalam setiap administrasi kependudukan tidak boleh dipungkiri dan benar harus dilakukan. Para pejabat pemerintah desa selalu memberikan kemudahan dalam menghubungkan masyarakat baik disabilitas maupun masyarakat yang mampu secara fisik. Masalah ini diatasi dengan datangnya langsung aparat pemerintah desa kerumah tempat tinggal masyarakat dan mengumpulkan data yang dimiliki dan mengurus langsung kelengkapan dokumen yang tidak sesuai ini kepada pihak dinas kependudukan.

Kejadian mendadak seperti melahirkan dan kematian sering tidak dilaporkan karena kendala secara ekonomi terutama bagi masyarakat penerima bantuan. Kebijakan yang diambil pemerintah desa

sangat konkrue dengan keadaan ekonomi penduduk jangan sampai mengabaikan administrasi kependudukan sebelum terjadi akibat panjang dibelakang hari.

### **3.1.2. Mobilisator (Penggerak)**

Dalam pengurusan administrasi kependudukan bagi para penerima bantuan pemerintah desa menerima masukan dan bila ada kegiatan JEMPOL yang dilakukan dinas kependudukan dan pencatatan sipil didesa, pagi pukul 08.00 setiap hari jumat para kepala dusun datang kelingkungan warga dengan menghimbau para penduduk untuk melengkapi dokumen kependudukan dengan berkeling disetiap dusun masing-masing.

Setiap hari para aparat pemerintahan desa melakukan hal ini dengan tujuan percepatan dan masalah yang sering muncul mengenai administrasi dari dasar berupa administrasi pelayanan kependudukan bisa dikurangi 68 dengan capaian pelayanan kita sama rata. Pengaruh besar pada pengurusan administrasi kependudukan kepada masyarakat penerima bantuan memberikan pedoman teknis dan bantuan percepatan pergerakan masyarakat.

### **3.1.3. Regulator (pengaturan)**

Aturan yang kami berikan dengan regulasi agar masyarakat tidak bingung dalam pergerakan yang dilakukan desa dengan tujuan ada syarat yang harus dipenuhi perorangan bagi penerima bantuan. Pedoman dengan alur masing-masing sering berubah sebagaimana dikatakan kepala desa. Pengembangan pola aturan jika dibiarkan berkembang didesa masyarakat akan kebingungan dalam pengurusan dokumen kependudukan dan pemenuhan administrasi kependudukannya.

### **3.1.4. Motivator (Pendorong)**

Aparat pemerintahan desa sebagai pelaksana jajaran pemerintah desa melakukan program pola peningkatan dokumen kependudukan bagi masyarakat penenerima bantuan langsung tunai dana desa dengan memberikan keluasaan berpikir tanpa tuntutan dengan dorongan kuat bahwa para pemerintah desa siap membantu dan melaksanakan tugas sebagai pelayan didesa bagi administrasi masyarakat. Dengan program para pemerintah desa ini mendorong semakin meratanya bantuan baik penyelenggaraan pembangunan berbasis desa. Mendorong masyarakat agar lebih meningkatkan kepedulian dalam pengurusan administrasi kependudukan terutama bagi penerima bantuan langsung tunai dana desa dapat memanfaatkan dana bantuan untuk keperluan memenuhi kebutuhan administrasi masing-masing.

## **3.2. Hambatan Peran Pemerintah Desa**

### **3.2.1. Fasilitator**

Penghambat bagi pemerintah desa bagi para disabilitas yang merupakan penduduk pindahan muncul masalah antara internal meliputi keluarga dengan dokumen keluarga masyarakat sehingga kelengkapan dokumen kependudukan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Sampel dan merupakan masyarakat disabilitas dan pindahan dengan penerimaan bantuan didesa.

### **3.2.2. Mobilisator (Penggerak)**

Menghimbau para penduduk untuk melengkapi dokumen kependudukan dengan berkeling disetiap dusun masing-masing dikarenakan jarak dan dorongan kurang dalam diri masyarakat muncul masalah transportasi dan kemauan dalam diri setiap keluarga menggunakan dana desa sebagai sarana melengkapi dokumen kependudukan masing-masing.

### **3.2.3. Regulator (pengaturan)**

Aturan yang kami berikan dengan regulasi agar masyarakat tidak bingung dalam pergerakan yang dilakukan desa dengan tujuan ada syarat yang harus dipenuhi perorangan bagi penerima bantuan. Pedoman dengan alur masing-masing sering berubah.

### **3.2.4. Motivator (Pendorong)**

Masyarakat yang telah menerima bantuan menghiraukan dorongan dan perintah dari para 88 pemerintah desa untuk memenuhi dokumen kependudukannya.

## **3.3. Solusi Peran Pemerintah Desa**

### **3.3.1. Fasilitator**

Memberi fasilitas memenuhi dokumen kependudukan dilakukan dengan cara turun langsung dengan masalah dimasyarakat sehingga jemput maslaah dapat diatasi dengan pedoman dan dampingan oleh pemerintah desa.

### **3.3.2. Mobilisator**

Setiap hari para aparat pemerintahan desa melakukan hal ini dengan tujuan percepatan dan masalah yang sering muncul mengenai administrasi dari dasar berupa administrasi pelayanan kependudukan bisa dikurangi dengan capaian pelayanan kita sama ratakan.

### **3.3.3. Regulator**

Aturan kami buat berkembang dengan alternatif. Pertama pembagian di triwulan pertama kami membuat syarat wajib KK dan kami sampaikan saat pembagian untuk triwulan kedua nantinya wajib dengan KTP agar dimana penduduk terdorong melengkapi dokumen kependudukannya.

### **3.3.4. Motivator**

Para perangkat desa sangat membantu dan memberi informasi. Dari beberapa penerima bantuan langsung tunai dana desa tidak berpikir bagaimana dana itu kadang hanya dipakai buat belanja padahal kita daerah desa untuk pangan masi bisa terpenuhi dari ladang. Anjuran yang pernah dilakukan para aparat desa seperti pentingnya dokumen sering dilakukan kepada masyarakat

## **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Peran pemerintah desa di desa Bonian terlihat jauh berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan dengan menggunakan 4 teori peran pemerintah oleh Arif melihat semakin jauh dan mendalam peran pemerintah desa sebagai pemerintah didasar pelayanan. Desa sebagai elemn dasar yang menunjang pengembangan dan kelengkapan administrasi admniistrasi desa.

Dana desa dialokasikan sebagai bantuan langsung tunai dalam keadaan pandemi membantu membangun percepatan pertumbuhan masyarakat desa dengan pemenuhan kelengkapan administrasi kependudukan masyarakat desa.

Pola yang belum pernah dilaksanakan dalam peran pemerintah desa dalam peningkatan administrasi kependudukan masyarakat yang jauh dari pusat administrasi kantor tingkat kabupaten atau kota. Realisasi dengan pendorong bantuan dengan alokasi dana desa sebagai pendorong personal bagi penerimanya untuk melengkapi administrasi kependudukan masing-masing keluarga.

Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya menitik beratkan kepada peran pengembangan dengan kekuasaan para aparat pemerintahan desa menunjukkan bahwa peneilitian ini sangat jauh berbeda dan mengetahui sejauh manna para aparat desa bertindak dengan aturan pengembangan dengan tidak keluar jalur dan merugikan masyarakat desa.

## **3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)**

Penulis menemukan faktor penghambat dan solusi bagi para pemerintah desa yang belum pernah diteliti sebelumnya. Pemerintah desa terlihat mengembangkan perannya yang terlihat

mengembangkan kekuasaan untuk membangun kesadaran masyarakat hingga tergeraknya masyarakat dalam kesadaran peningkatan administrasi diluar tugas dan fungsi awal pemerintah desa.

#### IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Bantuan langsung tunai dana desa yang diberikan kepada masyarakat memberikan dampak yang sangat besar terutama di Desa Bonian yang memberikan dorongan kepada masyarakat penerima bantuan untuk mengurus dokumen kependudukan dengan tujuan administrasi kependudukan tiap masyarakat bisa terpenuhi. Dana didorong untuk digunakan masing-masing personal dengan pemerintah desa sebagai mitra dan pendorong masyarakat dalam menggunakan dana untuk memenuhi dokumen kependudukan masing-masing.

Hambatan dihadapi pemerintah desa bagi penerima dan pengguna bantuan langsung tunai diantaranya:

- a. Data dokumen kependudukan dengan data dokumen BPJS yang dikeluarkan yang diberikan desa berbeda
- b. Disabilitas pindahan yang kesulitan mengetahui pedoman pembuatan dan pengurusan perubahan data kependudukan
- c. Perubahan data kependudukan sering mengabaikan alur
- d. Masyarakat yang telah menerima bantuan menghiraukan dorongan dan perintah dari parapemerintah desa untuk memenuhi dokumen kependudukannya

Solusi dalam menghadapi hambatan dalam perannya desa melakukan:

- a. Perbedaan data dalam dokumen yang memiliki data kependudukan dengan langkah menggerakkan dan membawa langsung bersangkutan untuk validasi data kependudukannya langsung ke kantor kecamatan
- b. Dilakukan sosialisasi, edukasi dan pergerakan dalam pengurusan dokumen kependudukan bagi para disabilitas
- c. pengurusan pemerintah desa melakukan pengaturan bagi masyarakat penerima bantuan dengan memberikan pedoman pengurusan
- d. mendorong aparat desa untuk memberikan motivasi dan ajakan dengan berkeliling dan penempelan ajakan kepada masyarakat disetiap dusun

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu desa saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pada pola pengembangan pemerintahan di daerah menurut Arif.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan peran pemerintah desa dalam peningkatan administrasi kependudukan bagi penerima bantuan langsung tunai dengan menitik beratkan sebagai pusat penelitian masyarakat kurang mampu untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada kepala desa Bonian beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Bacaan Berupa Buku Teks

- Atmosudirjo S. P., 1980. *Dasar-dasar Ilmu Administrasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Bernard R. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pusaka.
- Gibson J. L., (ends). 2006. *Organizations: Behavior, Structure, Process*, Fourteenth Edition. Americas, New York: McGraw-Hill Companies.
- Handyaningrat S., 1994. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Indrawati S. M. , 2017. *Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat: Menciptakan Lapangan Kerja, Mengatasi Kesenjangan, dan Mengentaskan Kemiskinan*. Jakarta: Menteri Keuangan
- Jamaludin A. N. , 2015. *Agama dan Konflik Sosial*. Cetakan Ke-1. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Keban Y. T., 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media
- Labolo M., 2007. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Kelapa Gading Permai.
- Mantra. I. B., 2009. *Demografi Umum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Mufiz A. 1986. *Pengantar Administrasi Negara*. Jakarta: Kaunika Universitas Terbuka.
- Ndraha T., 2003. *Kybernology I (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Nurcholis H., 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Poerwadarminta, W. L. T. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Yogyakarta : PT. Lingkar Pena.
- Prawiradinata R. S. *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai– Dana Desa 2020*. Jakarta: kompak
- Sabaruddin A. 2015. *Manajemen Kolaborasi Dalam Pelayanan Publik (Teori, Konsep dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Soemadiningrat. 2011. *Hukum Adat Kontemporer*. Bandung: Alumni.
- Soemantri T. B., 2010. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokusmedia.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Tjandra W. R., 2009. *Peradilan Tata Usaha Negara, Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya
- Widjaja, H.A.W. 2008. *Otonomi Desa: Meruapakan otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zulkarnaen dan Beni A. **Saebani**. 2012. *Hukum Konstitusi*. Bandung: CV Pustaka Setia.

### B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2020 Tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2019 Tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan Untuk Pengembangan Statistik Hayati  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota  
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021  
Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum  
Peraturan Kabupaten Dairi No 08 Tahun 2009 Tentang Administrasi Kependudukan  
Peraturan Bupati Dairi No 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2020

### **C. Sumber Bacaan Berupa Jurnal Atau Majalah Ilmiah**

Aksan, (dkk). 2018. *“Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa”*. Vol. 3, Neo Societal.

Arsjad M. F. 2018. *“Peranan Aparat Desa dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo”*. Vol. 1, Gorontalo Journal of Public Administration Studies.

Chasanah K., Slamet Rosyadi, Denok Kurniasih. 2017. *“Implementasi Kebijakan Dana Desa”*. Vol. 3, IJPA-The Indonesian Journal of Public Administration.

Firdaus R., 2020. *“Peran Pemerintah Daerah Sebagai Regulator, Dinamisator, Fasilitator, Dan Katalisator Dalam Pemberdayaan Petani Kakao Di Kabupaten Luwu Utara”*. Vol. 3, Jurnal I La Galigo.

Gani R., Lucyane Djafar, Sri H. Paramata. 2016. *“Peranan Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Dulamayo Utara Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo”*. Vol.5, Publik: Jurnal Ilmu Administrasi.

Maun C. E. F., 2020. *“Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan”*. Jurnal Politico: Unsrat.

Rukayat Y. 2017. *“Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Pasirjambu”*. Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi No.2 Tahun XI.

Widjaja M., 2009. *“An Economic and Social Review on Indonesian Direct Cash Transfer Program to Poor Families Year 2005”*. Classification: I38, Journal of Economic Literature.

### **D. Sumber Bacaan Berupa Artikel Dan Sekumpulan Tulisan**

Halim N. R., 2010. *“Peran Pengambil Kebijakan Dalam Pengembangan Masyarakat”*. Deputi Bidang Pengembangan SDM, Kementerian Negara Koperasi dan UKM

Rustiarini N. W., 2016. *“Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa”*

Nuqul F. L. 2020 *“Teori Peran”*.

### **E. Sumber Bacaan Dari Internet**

mahyunish.blogspot.com. *Pengakuan Dan Penghormatan Negara Terhadap Masyarakat Adat Serta Hak-Hak Tradisionalnya Di Provinsi Kalimantan Selatan*. Rabu, 13 September 2013.

<https://www.bappenas.go.id>. *Narasi Tunggal Wujud Kerja Nyata Untuk Negeri Melalui Inovasi*. 10 Agustus 2016.